

BAB I

STRATEGI KOMUNIKASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal di wilayah yang sama, relatif independen, dengan orang-orang di luar wilayah itu dan memiliki budaya yang sama¹. Pendapat lain mengemukakan bahwa masyarakat ialah orang-orang yang berinteraksi dan memiliki kebudayaan yang sama (John J. Macionis, 1997).

Organisasi merupakan sebuah kesatuan yang berusaha untuk mengkordinasikan berbagai macam kepentingan². Ada banyak para ahli yang mendefinisikan tentang organisasi. Salah satunya Max Weber yang mendefinisikan organisasi sebagai suatu himpunan ialah yang membiasakan diri untuk memenuhi perintah para pimpinan dan yang memiliki kepentingan pribadi dalam berlanjutnya dominasi berdasarkan partisipasi mereka sendiri dan keuntungan-keuntungan yang dihasilkan, telah membagi-bagi penggunaan fungsi-fungsi tersebut di kalangan mereka sendiri yang siap melayani pelaksanaannya. Yang mengartikan bahwa dalam sebuah organisasi, setiap anggota yang ada di dalamnya harus siap dan patuh pada pelaksanaan dari setiap perencanaan yang ada di dalamnya.

Di Provinsi Banten, jenis masyarakatnya sudah sangat beragam layaknya kota-kota besar. Berbagai suku, agama, budaya bahkan politik. Dari keberagaman inilah menjadi pemicu lahirnya organisasi masyarakat. Demi memenuhi kepentingan yang terjadi di masyarakat Banten itu sendiri. Di pedesaan, organisasi masyarakat sering kali berbentuk paguyuban.

¹ Dedeh Maryani dkk, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sleman : Deepublish, 2019), h
2

² Fachrurazi dkk, *Dasar dan Konsep Manajemen Organisasi*, (Batam : CV. Rey Media Grafika, 2022), h 42

Paguyuban pertanian, peternakan, PKK, atau arisan atau kelompok yang disesuaikan dengan keadaan setempat³.

Di provinsi Banten, organisasi masyarakat biasanya berbentuk paguyuban, yang terdaftar dan tercatat aktif oleh kesbangpol ada 243 ormas yang tersebar di daerah Provinsi Banten⁴. Menurut Pak TB. Helmi, selaku staff bidang ketahanan sosial, hal tersebut terjadi *dikarenakan tidak semua organisasi masyarakat mendaftarkan dan melaporkan diri tentang keberadaan organisasi dan kegiatannya*. Tentunya dengan tujuan dan misi tertentu yang lahir dari kesamaan pendapat di masyarakat.

Meskipun ormas atau LSM tersebut lahir karna kesamaan pendapat di masyarakat, sehingga banyak ormas yang tak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Pancasila. Bahkan tak sedikit ormas yang menjadi biang kerusuhan. Pak Helmi juga mengatakan bahwa ada ormas yang *Mengatasnamakan ormas atau lembaga swadaya masyarakat untuk pungutan liar demi keuntungan pribadi atau kelompok ormas, provokasi terhadap warga dan hal-hal yang meresahkan lainnya*. Oleh karena itu, diperlukannya jembatan dari perangkat daerah yang mendata dan memfasilitasi pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut.

Badan Kesbangpol Banten menjadi jembatan antara ormas dan pemerintah. Dikarenakan kesbangpol merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten no 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten memiliki tugas pokok *“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan*

³ Rifki Rosad dkk, *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*, (Bandung : S2 UIN Sunan Gunung Djati, 2022), h 33

⁴ Arsip Kesbangpol Provinsi Banten 2022-2023

*wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik”.*⁵

Badan Kesbangpol Banten sendiri memberi kebebasan terhadap para ormas yang ada di Banten. Dari mulai pendaftaran, hingga proses kegiatan. Lembaga swadaya masyarakat atau ormas ini dibebaskan memilih pendaftaran perizinan yang berbadan hukum atau tidak (memilih mendaftarkan lembaga di Kemenkum ham atau Kemendagri). Juga diperbolehkan mengurus sendiri lalu melapor ke Badan Kesbangpol Provinsi Banten, atau menyerahkan berkas dan difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Banten.

Organisasi masyarakat masuk ke dalam binaan bidang ketahanan sosial dan ekonomi, sub bidang organisasi sosial. Dari mulai persyaratan, perizinan, pendaftaran, hingga pembinaan. Dengan jumlah organisasi yang ada di Banten tidak sedikit, sub bidang organisasi sosial dipastikan memiliki strategi komunikasi dalam pembinaannya terhadap organisasi masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Mengidentifikasi strategi pembinaan serta faktor pendukung dan penghambat proses pembinaan dan penanggulangannya. inilah yang menjadi titik fokus peneliti.

Dengan hal-hal yang tercantum di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang strategi komunikasi kesbangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat, penanggulangan ormas yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya, serta jenis kegiatan pembinaan lain yang ditujukan untuk ormas-ormas yang ada di Banten agar tidak menjadi ormas yang nakal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penyusun merumuskan sebagai berikut :

⁵ *Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022*
<https://kesbangpol.bantenprov.go.id> diakses tanggal 09 September 2022 pukul 08:50 wib h

1. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan Kesbangpol Banten dalam pembinaan organisasi masyarakat?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan organisasi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka peneliti menuliskan tujuan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan Kesbangpol Banten dalam pembinaan organisasi masyarakat
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan organisasi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Selain untuk penyusun dalam penyelesaian proposal dan skripsi, ini juga dapat dijadikan acuan oleh para peneliti lain untuk memanfaatkan penelitian ini sebagai salah satu referensi sehingga lebih bermanfaat.

2. Secara praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya dalam berorganisasi serta sikap dan strategi yang harus digunakan baik bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, peneliti mencari pustaka dari penelitian terdahulu yang sebelumnya sudah dilakukan oleh orang-orang yang lebih dulu meneliti hal terkait sebagai referensi dan perbandingan antara satu dan yang lainnya. Hal ini memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

Pertama, ada penelitian yang berjudul Peran Kesbangpol Linmas dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan⁶ yang ditulis oleh Yasni Efyanti, mahasiswi IAIN Kerinci tahun penelitian 2018 hasil penelitiannya ialah usaha-usaha yang dilakukan oleh Kesbangpol Linmas kota Sungai Penuh untuk menjaga kestabilan politik dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan terhadap ormas sebagai upaya pembinaan dari kesbangpol untuk ormas kota Sungai Penuh. Juga upaya sosial politik lainnya. Seperti dalam pemiihan umum, mengadakan pertemuan dengan skala dua kali pertemuan dan membantu menengahi permasalahan yang terjadi, dan mefasiliasinya.

Kedua, ada penelitian yang berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa dalam Pembinaan dan Penertiban Organisasi Masyarakat dan Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat⁷ yang ditulis oleh Chandra Wira Hadi Shantika, seorang Asdaf Kota Cimahi, tahun penelitian 2022 hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Badan Kesbangpol Cimahi dalam pembinaan ormas dan lembaga swadaya masyarakat telah dilakukan secara maksimal. Sedangkan penyebab terjadinya pelanggaran di ormas atau lsm di kota Cimahi itu diantaranya persaingan wilayah, kondisi situasional, perbedaan pandangan, kondisi keorganisasian, serta tuntutan untuk pemerintah yang tidak terpenuhi.

Ketiga, penelitian yang berjudul Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Adat (studi kasus di Badan Kesbangpolda)⁸ yang ditulis oleh Novrianto dan kawan-kawannya. Tahun penelitian 2022. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpolda dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat

⁶ Yasni Efyanti, "Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan" dalam *Jurnal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 02, (Desember 2018) IAIN Kerinci.

⁷ Chandra Wira Hadi Santika, "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan dan penerbitan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat" (asdaf kota Cimahi, Program Studi Politik Indonesia terapan).

⁸ Novriyanto Wartabone Mandak, dkk. "Kinerja Pemerrintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Adat (studi kasus di Badan Kesbangpolda)", *Journal Governance*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, h.1

selalu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, generasi muda dan lsm. Dikarenakan pihak kesbangpolda sangat membutuhkan bantuan kerja sama dari semua elemen masyarakat. Dengan tujuan pembinaan terhadap organisasi masyarakat berjalan dengan baik.

Dan yang terakhir dengan judul Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan Organisasi Masyarakat di Karawang⁹. Jurnal ini ditulis oleh Dida Rizki Ramadhan dan Gun Gun Gumilar pada tahun 2022. Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kantor kesbangpol karawang melakukan pembinaan terhadap ormas agar tidak terjadi konflik dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan serta pembinaan dengan wawasan kebangsaan.

Dari keempat penelitian terdahulu yang sudah disebutkan di atas, peneliti menyimpulkan perbedaan dan persamaannya yang sudah dituliskan dalam kolom di bawah, yaitu :

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Kesbangpol Linmas dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. Yasni Efyanti, IAIN Kerinci 2018	Menjadikan badan kesbangpol sebagai titik fokus penelitian dan pembahasan yang diangkat adalah pembinaan organisasi masyarakat	Pemilihan sub-Bidang yang menjadi objek.
2.	Peran Badan Kesatuan Bangsa dalam Pembinaan dan	Menjadikan badan kesbangpol sebagai titik fokus	Selain perbedaan wilayah, cakupan penelitian yang

⁹ Dida Rizki Rhamadan, "Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten karawang", (jurnal ilmiah Muqodimmah Fisip, Universitas Muhammadiyah Tapanulli Selatan).

	<p>Penertiban Organisasi Masyarakat dan Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Chandra Wira Hadi Shantika, Asdaf Kota Cimahi, 2022</p>	<p>penelitian dan pembahasan yang diangkat adalah pembinaan organisasi masyarakat</p>	<p>lebih kecil diandingkan dengan penyusun. Penelitian sebelumnya mencakup peran kesbang kota, sedangkan penyusun mencakup kesbangpol provinsi</p>
3.	<p>Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakata Adat (studi kasus di Badan Kesbangpolda).</p> <p>Novrianto, dkk. Sulawesi Utara, 2022.</p>	<p>Menjadikan badan kesbangpol sebagai titik fokus penelitian dan pembahasan yang diangkat adalah pembinaan organisasi masyarakat</p>	<p>Output serta hasil dari penelitian</p>
4.	<p>Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang.</p> <p>Dida Rizki Ramadhan dan Gun Gun Gumilar, Karawang, 2022.</p>	<p>Menjadikan badan kesbangpol sebagai titik fokus penelitian dan pembahasan yang diangkat adalah pembinaan organisasi masyarakat</p>	<p>Objek penelitian serta jenis penelitian.</p>

Tabel 1.1 persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

F. Kerangka Teori

a. Pengertian strategi

Strategi secara umum dapat diartikan sebagai seluruh pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan pelaksanaan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga makna dari strategi, yaitu ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai¹⁰.

Bisa dikatakan sebagai siasat atau cara lain dalam mencapai tujuan bersama. Strategi yang baik memiliki tema, kordinasi tim kerja, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, keefesienan dana dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan yang efektif dan sesuai dengan perencanaan awal.

b. Pengertian komunikasi

Komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik¹¹. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses interaksi yang terjalin antar individu atau kelompok, baik secara verbal atau non verbal, yang di dalamnya terdapat pesan atau informasi yang akan disampaikan terhadap penerima pesan itu sendiri.

Komunikasi hanya dapat terjadi apabila para komunikatornya menggunakan system isyarat yang sama (pittenger dkk., 1960)¹². Hal ini dimaksudkan, proses komunikasi tidak akan bisa terjadi jika terdapat perbedaan sistem isyarat yang berbeda antara komunikator dan komunikan, baik dari Bahasa atau dari jenis komunikasinya.

¹⁰ KBBI (<https://kbbi.kemendikbud.go.id>) diakses pada tanggal 23/09/2022 jam 11.07 wib.

¹¹ Joseph A DeVito, *Komunikasi Antar Manusia Edisi Lima*, (Tangerang Selatan : Karisma Publisihing Group, 2011), h 24

¹² Joseph A DeVito, *Komunikasi Antar Manusia Edisi Lima ...* h 41

Orang yang hanya bisa berbahasa Batak tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang yang hanya bisa berbahasa Sunda, oleh karena itu, adanya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa pemersatu. Orang yang tidak mengerti Bahasa Isyarat tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang yang tunarungu atau tunawicara.

Perilaku komunikasi, biasanya terjadi melibatkan pesan verbal, isyarat tubuh atau kombinasi dari keduanya. Harus ada pemahaman di antara pengirim dan penerima pesan. Sama halnya dengan pembinaan Organisasi Masyarakat yang ada di kesbangpol, apabila tidak ada kesamaan sistem dengan komunikasi, strategi atau pola apapun yang digunakan, tidak akan berhasil dikarenakan dari proses komunikasinya saja sudah gagal.

c. Pengertian organisasi masyarakat

Pengertian organisasi masyarakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sebagai berikut, “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹³

Keberadaan organisasi masyarakat yang sesuai dengan fungsinya masing-masing merupakan salah satu faktor pendukung pembinaan yang dilakukan oleh kesbangpol Provinsi Banten. Sama halnya dengan sebaliknya. Keberadaan organisasi masyarakat atau LSM yang mengajimumpungkan dengan mengambil keuntungannya untuk sendiri atau kelompok, menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembinaan

¹³ Tim Redaksi BIP, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013*, (Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2018) h 3

yang dilakukan kesbangpol untuk mencapai tujuannya. Diantaranya ialah menertibkan dan menjinakkan organisasi masyarakat agar tidak meresahkan bagi masyarakat lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis membahas tentang apa yang akan dicapai. Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** Kajian Pustaka dan Landasan teori. Kajian pustaka meliputi pengertian strategi, pengertian komunikasi, jenis komunikasi, tujuan komunikasi, pengertian strategi komunikasi, langkah strategi komunikasi, pengertian pembinaan, pengertian organisasi kemasyarakatan dan jenis organisasi masyarakat. Landasan Teori berisikan Komunikasi Organisasi dan komunikasi antar budaya. Pada komunikasi organisasi meliputi pengertian, jaringan, struktur jaringan serta arus komunikasi. Pada teori komunikasi antar budaya meliputi pengertian, pentingnya komunikasi antar budaya, serta hambatan komunikasi antar budaya.
- Bab III** Metodologi penelitian yang berisikan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan serta analisis data
- Bab IV** Analisis data dan pembahasan yang berisikan gambaran umum dari lokasi penelitian, sejarah singkat, visi misi, serta uraian hasil dari penelitian.
- Bab V** Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan judul tersebut.